

# STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI 2017



# STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI 2017



*BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOGIRI*

# STATISTIK PENDIDIKAN

## KABUPATEN WONOGIRI

### 2017

No. Publikasi : 33120.1839  
Katalog BPS : 4301002.3312  
Ukuran Buku : 16 cm x 22 cm  
Jumlah Halaman : xiv + 96 halaman

#### TIM PENYUSUN

Pengarah : DJULFIKAR RIZKY, M.Si.  
Penanggung jawab : NUR ISA PRATOWO SE.,M.Si.  
Penyunting : NUR ISA PRATOWO SE.,M.Si.  
Penulis : DIAN SISWANTI, S.ST, M.Si.  
Pengolahan : DIAN SISWANTI, S.ST, M.Si.  
Gambar Kulit : DIAN SISWANTI, S.ST, M.Si.  
Infografis : DIAN SISWANTI, S.ST, M.Si.

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2017, bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Wonogiri secara umum. Data yang disajikan mencakup beberapa aspek kegiatan pendidikan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Publikasi ini juga memberikan beberapa konsep dan definisi yang berkaitan dengan statistik kesehatan agar pengguna data dapat lebih memahami data yang disajikan. Kritik dan saran membangun sangat dihargai untuk perbaikan publikasi mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Wonogiri, DESEMBER 2018  
BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala,

DJULFIKAR RIZKY, M.Si.  
NIP. 19650914 198802 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	xiii
INFOGRAFIS	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang Masalah.....	3
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Sistematika Penyajian.....	5
BAB 2 METODOLOGI.....	7
2.1 Sumber Data.....	7
2.2 Ruang Lingkup.....	8
2.3 Kerangka Sampel.....	8
2.4 Pemilihan Sampel.....	9
2.5 Keterwakilan Sampel.....	9
2.6 Konsep dan Definisi.....	11
2.7 Keterbatasan Data.....	16
2.8 Metode Analisis.....	16
BAB 3 PENUNJANG PENDIDIKAN.....	17
3.1 Penggunaan Internet.....	17
3.2 Biaya Pendidikan.....	25
3.3 Bantuan Pendidikan.....	28
BAB 4 PARTISIPASI PENDIDIKAN.....	31
4.1 Pendidikan Anak Usia Dini.....	32
4.2 Partisipasi Sekolah.....	36
4.3 Angka Partisipasi Sekolah.....	39
4.4 Angka Partisipasi Kasar.....	41
4.5 Angka Partisipasi Murni.....	45
BAB 5 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN.....	48
5.1 Angka Melek Huruf.....	49
5.2 Rata-rata Lama Sekolah.....	52
5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	54
LAMPIRAN TABEL	57
DAFTAR PUSTAKA	95

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Kegiatan Mengakses Internet dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017	19
Tabel 3.2	Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Tipe Daerah, Jenjang Pendidikan dan Perangkat yang Digunakan untuk Mengakses Internet, Kabupaten Wonogiri 2017	20
Tabel 3.3	Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Lokasi Mengakses Internet dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016	22
Tabel 3.4	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017 (Rupiah)	27
Tabel 4.1	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2017	34
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017	37
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Usia 5 - 24 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017	38
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017	40
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017	43

## Halaman

Tabel 4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017	47
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2017	50

<https://wonogirikab.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>	
Gambar 3.1	Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017	23
Gambar 3.2	Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017	24
Gambar 3.3	Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis kelamin dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017	25
Gambar 3.4	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pendidikan menurut Jenis Kelamin KRT dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	28
Gambar 3.5	Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Sumber Bantuan Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017	29
Gambar 4.1	Perkembangan Partisipasi Anak yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2015-2017	33
Gambar 4.2	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017	35
Gambar 4.3	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, 2016 dan 2017	40
Gambar 4.4	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, 2016 dan 2017	42



## Halaman

Gambar 4.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, 2016 dan 2017	46
Gambar 5.1	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, Kabupaten Wonogiri 2013 - 2017	53
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2016	54
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2017	55
Gambar 5.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2017	56

## DAFTAR LAMPIRAN

		<b>Halaman</b>
Tabel 1	Jumlah Rumah Tangga menurut Tipe Daerah (ribuan) Kabupaten Wonogiri, 2014-2017	59
Tabel 2	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	60
Tabel 3	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	61
Tabel 4	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	62
Tabel 5	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Biaya Pendidikan Tiap Bulan menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	63
Tabel 6	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	64
Tabel 7	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	65
Tabel 8	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2017	66
Tabel 9	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	67

		<b>Halaman</b>
Tabel 10	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2014-2017	68
Tabel 11.1	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan)	69
Tabel 11.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017 (Pedesaan)	70
Tabel 11.3	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan +Pedesaan)	71
Tabel 12	Persentase Penduduk Usia 7-12 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	72
Tabel 13	Persentase Penduduk Usia 13-15 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	73
Tabel 14	Persentase Penduduk Usia 16-18 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	74
Tabel 15	Persentase Penduduk Usia 19-24 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	75
Tabel 16	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Sedang Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	76
Tabel 17.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan)	77
Tabel 17.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Pedesaan)	78

## Halaman

Tabel 17.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan+Pedesaan)	79
Tabel 18.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan)	80
Tabel 18.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Pedesaan)	81
Tabel 18.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan+Pedesaan)	82
Tabel 19.1	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan)	83
Tabel 19.2	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Pedesaan)	84
Tabel 19.3	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan+Pedesaan)	85
Tabel 20.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan)	86
Tabel 20.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Pedesaan)	87
Tabel 20.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017 (Perkotaan +Pedesaan)	88
Tabel 21	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017	89

## Halaman

Tabel 22	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017	90
Tabel 23	Persentase Siswa Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2015-2017	91
Tabel 24	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2013-2017	92
Tabel 25	Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017	93
Tabel 26	Angka Drop Out menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017	94

## Abstraksi

Pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan dan keberlangsungan hidup bangsa dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaminkannya dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 (hasil amandemen) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

*Statistik Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2017* dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Data yang disajikan berkaitan dengan kondisi dan perkembangan pendidikan yang akan dilihat dari tiga aspek yaitu sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, dan hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan maka disajikan pula data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf, dll.

<https://wonogirikab.bps.go.id>



Persentase Siswa Usia 5 Tahun Ke atas yang mengakses Internet menurut perangkat yang digunakan



KOMPUTER  
25,99 %



LAPTOP/ NETBOOK/  
TABLET  
16,29 %



HP / PONSEL  
57,50 %



LAINNYA  
0,22 %

ANGKA MELEK HURUF  
PENDUDUK USIA 15 TAHUN  
KEATAS



95,11 %



84,56 %



89,61 %

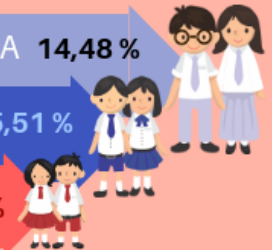
RUMAH TANGGA  
PENERIMA BANTUAN  
PENDIDIKAN

11,18  
%

BSM SMA 14,48 %

BSM SMP 25,51 %

BSM SD 60,01 %





<https://wonogirikab.bps.go.id>

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan dan keberlangsungan hidup bangsa dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaminkannya dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 (hasil amandemen) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Pertumbuhan pembangunan ekonomi akan terjadi melalui kontribusi secara signifikan dari sumber daya manusia yang berkualitas. SDM tersebut menjadi tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta menguasai teknologi yang nantinya dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif.

Jika dalam membangun pendidikan mengalami kegagalan maka akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Permasalahan pendidikan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini adalah kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan dan kurangnya efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia pendidikan, pemerintah mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju. Salah satu upaya tersebut adalah perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu yaitu dengan menyelenggarakan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warna negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu langkah pemerintah untuk mensinergikan program-program pendidikan agar tepat sasaran antara lain dengan adanya program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Sasaran program PUS ini antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pemberantasan Buta Aksara, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kesenjangan dan Keadilan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan maka dibutuhkan data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf, dll. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran-ukuran kuantitatif yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan.

## 1.2 Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyajian publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonogiri adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari tiga aspek yaitu : sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, dan hasil pembangunan pendidikan.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan pencerahan, monitor dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan target yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## 1.3 Sistematika Penyajian

Bagian awal publikasi ini menyajikan abstraksi untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca atas keseluruhan kandungan publikasi. Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab 1** berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian.

**Bab 2** menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang mencakup sumber data, keterwakilan sampel, konsep dan definisi, keterbatasan data, serta metode analisis.

**Bab 3** menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang penggunaan internet, biaya pendidikan dan beasiswa/bantuan pendidikan.

**Bab 4** tentang partisipasi pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, serta pendidikan kesetaraan.

**Bab 5** membahas tentang hasil-hasil pembangunan pendidikan yang antara lain dicerminkan oleh angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan putus sekolah.

Data-data pendidikan yang ditampilkan pada tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel-tabel lampiran. Penjelasan keterwakilan sampel disajikan dalam metodologi.

### **2.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015. Jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data Kor Susenas Tahun 2016, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai pendidikan seperti sarana prasarana pendidikan, partisipasi pendidikan, dan hasil pembangunan pendidikan.
- b. Data Modul Konsumsi dan Pengeluaran Tahun 2016, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai konsumsi rumah tangga terkait dengan pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Konsumsi dan Pengeluaran, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pada tahun 2011 terjadi perubahan, pengumpulan data konsumsi dan pengeluaran dilakukan secara triwulanan (triwulan I-IV) yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember bersamaan dengan

Kor. Susenas Triwulanan dilaksanakan pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2015, pelaksanaan Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu bulan Maret dan September.

## **2.2 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Susenas Maret 2016 Kabupaten Wonogiri mencakup 800 rumah tangga sampel. Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan pencacahan Susenas pada bulan September dengan sampel kecil 800 rumah tangga sampel hanya bisa digunakan untuk estimasi tingkat Provinsi/Nasional. Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2016 menampilkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014 - 2016.

## **2.3 Kerangka Sampel**

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

- Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
- Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar 25% blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya.
- Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.
-

## 2.4 Pemilihan Sampel

Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan tiga tahap berstrata.

Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut :

- Tahap pertama, memilih 25% blok sensus populasi secara pps (Probability Proportional to Size) dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.
- Tahap kedua, memilih sejumlah  $n$  blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.
- Tahap ketiga, memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan dari BPS Pusat setelah hasil pemutakhiran di entri.

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

## 2.5 Keterwakilan Sampel

Keterwakilan sampel dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu banyaknya sampel, kesalahan sampling (*sampling error*), dan kesalahan non



sampling atau human errors (*nonsampling error*). Keterwakilan sampel ini memengaruhi estimasi hasil pendataan.

(1) Banyaknya sampel

Semakin banyak atau semakin besar jumlah sampel dalam suatu survei, maka estimasi yang dihasilkan akan semakin mendekati karakteristik populasinya.

(2) Kesalahan non sampling (*NonSampling Error*)

Non sampling error merupakan kesalahan yang muncul pada saat pelaksanaan survei dan atau saat pengolahan data. Contoh dalam pelaksanaan survei :

- (i) Penggunaan konsep dan definisi yang salah oleh petugas akibat kesalahan penyampaian dari instruktur ke petugas pencacah maupun pengawas;
- (ii) Tidak ditemukannya rumah tangga sampel;
- (ii) Kesalahan pengertian antara responden dan petugas
- (iii) pencacah pada saat wawancara.

Sedangkan kesalahan pada saat pengolahan :

- (i) Kesalahan pada saat perekaman data (entry data);
- (ii) Kesalahan editing dan coding.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendataan yang bertujuan untuk memperkecil jenis kesalahan ini, namun kesalahan non sampling tidak dapat dihilangkan sama sekali serta sulit untuk dievaluasi secara statistik.

### (3) Kesalahan sampling (*Sampling Error*)

*Sampling error* merupakan kesalahan yang muncul akibat dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Estimasi yang dihasilkan dalam survei tidak terlepas dari *sampling variability*. Secara statistik, besarnya *sampling error* dapat ditunjukkan oleh besarnya angka galat baku (*standard error/SE*). Untuk mengukur sejauh mana sampel yang digunakan sudah cukup menggambarkan keadaan parameter populasi digunakan *Relative Standard Error (RSE)*, yaitu hasil bagi SE dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

## 2.6 Konsep dan Definisi

- a) **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b) **Blok Sensus** adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.
- c) **Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus**  
**Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan

fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

**Rumah Tangga Khusus** adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) berjumlah 10 orang atau lebih.

d) **Kepala Rumah Tangga (KRT) dan Anggota Rumah Tangga (ART)**

**Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

**Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

**Tidak termasuk anggota rumah tangga** yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- e) **Biaya pendidikan** adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden.
- f) **Bantuan Pendidikan** adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang bukan karena prestasi, baik berupa uang atau barang, seperti : Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan dari PNPM (buku, sepatu, uang transport), beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas. Sumber beasiswa/bantuan pendidikan bisa berasal dari BSM (Bantuan Siswa Miskin; bantuan/beasiswa pemerintah lainnya; lembaga non pemerintah; sekolah maupun perorangan).
- g) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.
- Pendidikan nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).
- Pendidikan formal maupun non formal** yang dimaksud disini adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.
- h) **Pendidikan anak usia dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- i) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

**Masih bersekolah** adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

**Tidak bersekolah lagi** adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

- j) **Partisipasi Pendidikan**

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

**Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

**Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- k) **Angka Putus Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang putus sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- l) **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.
- m) **Tamat sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- n) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

**SD/MI** meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

**SMP/MTs** meliputi jenjang pendidikan SMP Umum,

**Madrasah** Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

**SM/MA** meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2/S3 dan sederajat.

- o) **Mengakses internet** adalah apabila seseorang meluangkan waktu untuk mengakses internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet seperti : mencari literature/ referensi, mencari/ mengirim informasi/ berita, komunikasi, e-mail/chatting, dll.

## 2.7 Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya tidak dicakup.

## 2.8 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif satu atau dua sektor dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai perkembangan pendidikan selama beberapa periode waktu. Pada akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran.

Pendidikan bermutu merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Oleh karena itu penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan penunjang pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam pemenuhan pendidikan nasional yang bermutu akan sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata. Sarana prasarana merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. Di era modern saat ini, internet merupakan salah satu sarana pendidikan yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Internet dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan.

Gambaran faktor internal rumah tangga dalam upaya memperoleh pendidikan layak bagi seluruh bagi seluruh warga negara akan dibahas pada bab ini, dimulai dari kemudahan penduduk dalam mengakses pendidikan baik dari aspek penggunaan internet, biaya pendidikan termasuk bantuan pendidikan yang diterima rumah tangga.

### **3.1 Penggunaan Internet**

Sebelum adanya Internet, salah satu masalah yang dihadapi oleh pendidikan (di seluruh dunia) adalah akses kepada sumber informasi. Dengan adanya internet, informasi dapat diakses sebanyak-banyaknya,



baik informasi berupa artikel, gambar, ataupun video.

Di era digital seperti saat ini, internet sudah menjadi salah satu media yang sangat penting bagi siapapun dalam memperluas wawasannya. Manfaat Internet sekarang sudah dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Salah satu manfaatnya adalah menjadi media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan masa depan. Kehadiran internet bukanlah pengganti sistem pendidikan melainkan lebih bersifat penambah dan pelengkap.

Selain bermanfaat bagi siswa, internet juga dapat memberikan dampak yang buruk. Hal ini disebabkan internet tidak hanya menyajikan informasi-informasi positif saja, namun juga informasi-informasi yang bersifat negatif. Oleh karena itu penggunaan internet oleh siswa sebaiknya mendapat pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, pada tabel 3.1 memperlihatkan persentase siswa sekolah yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir baik ketika dia mengakses internet di rumah sendiri, di warnet, di kantor, dengan menggunakan HP/ponsel, maupun mengakses dengan menggunakan modem *portable*.

Persentase siswa yang mengakses internet ternyata lebih sedikit (46,88 persen) dibandingkan dengan siswa yang tidak mengakses internet (53,12 persen). Adapun siswa di perkotaan lebih banyak yang sudah mengakses internet (55,02 persen) daripada di perdesaan (44,43 persen).

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mengakses internet juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana teknologi yang memberikan kemudahan dalam mengakses internet, misalnya tersedianya warnet, wifi gratis, dan lain-lain.

**Tabel 3.1 Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Kegiatan Mengakses Internet dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Jenjang Pendidikan	Akses Internet		
	Ya	Tidak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(5)
<b><u>Perkotaan</u></b>			
SD/MI	16,62	83,38	100,00
SMP/MTs	79,59	20,41	100,00
SM/MA	92,62	7,38	100,00
PT	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>55,02</b>	<b>44,98</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Pedesaan</u></b>			
SD/MI	7,03	92,97	100,00
SMP/MTs	73,76	26,24	100,00
SM/MA	95,14	4,86	100,00
PT	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>44,43</b>	<b>55,57</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Perkotaan+Pedesaan</u></b>			
SD/MI	9,00	91,00	100,00
SMP/MTs	75,49	24,51	100,00
SM/MA	94,66	5,34	100,00
PT	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>46,88</b>	<b>53,12</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.2 Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Tipe Daerah, Jenjang Pendidikan dan Perangkat yang Digunakan untuk Mengakses Internet, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Jenjang Pendidikan	Alat untuk mengakses Internet					Total
	Komputer	Laptop/ Notebook	Tablet	HP/ Ponsel	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b><u>Perkotaan</u></b>						
SD/MI	27,46	17,29	9,75	45,50	0,00	100,00
SMP/MTs	23,57	12,71	5,89	55,79	2,04	100,00
SM/MA	21,77	14,19	0,00	64,04	0,00	100,00
PT	26,15	9,77	0,00	64,08	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>23,95</b>	<b>13,38</b>	<b>3,80</b>	<b>58,03</b>	<b>0,84</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Pedesaan</u></b>						
SD/MI	6,85	10,63	13,67	68,84	0,00	100,00
SMP/MTs	34,59	9,67	2,75	53,00	0,00	100,00
SM/MA	25,15	11,57	2,97	60,32	0,00	100,00
PT	17,57	29,00	0,00	53,43	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>26,72</b>	<b>12,77</b>	<b>3,20</b>	<b>57,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Perkotaan+Pedesaan</u></b>						
SD/MI	16,21	13,66	11,89	58,25	0,00	100,00
SMP/MTs	31,47	10,53	3,64	53,79	0,58	100,00
SM/MA	24,49	12,08	2,39	61,04	0,00	100,00
PT	20,27	22,96	0,00	56,77	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>25,99</b>	<b>12,93</b>	<b>3,36</b>	<b>57,50</b>	<b>0,22</b>	<b>100,00</b>

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa sebagian besar pengguna internet di kalangan siswa usia 5 Tahun ke atas menggunakan HP/Ponsel untuk mengakses internet (57,50 persen). Semakin bertambahnya penggunaan *handphone* di Indonesia, mempengaruhi jumlah pengguna internet yang mengakses melalui media HP/Ponsel. Hal ini disebabkan karena hampir semua operator selular memberikan akses internet sebagai layanan tambahan di jaringan selular mereka. Sebanyak

25,99 persen siswa menggunakan komputer sebagai sarana untuk mengakses internet, sisanya sebanyak 12,93 persen menggunakan laptop/notebook, 3,36 persen menggunakan tablet dan 0,02 persen menggunakan perangkat lainnya.

Internet masa kini telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat Indonesia baik di kota maupun di desa. Keberadaannya seperti sudah menjadi hal yang biasa bagi sebagian penduduk dan setiap harinya pula pengguna fasilitas internet di Indonesia semakin meningkat. Sehingga, tidak heran bila kemudian pola penggunaan internet di daerah perkotaan maupun perdesaan menjadi hampir sama. Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa pengguna internet dengan menggunakan HP/Ponsel di daerah perkotaan (58,03 persen) bahkan bisa lebih tinggi dari daerah perdesaan (57,31 persen).

Pengguna internet dengan media laptop/notebook/tablet di daerah perkotaan sebanyak 17,18 persen lebih besar dibandingkan di pedesaan yaitu 15,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada kesenjangan digital antara siswa yang tinggal di daerah perkotaan (lebih sejahtera) dengan yang tinggal di daerah perdesaan (kurang sejahtera). Alasan utamanya adalah karena keterbatasan kepemilikan media laptop/notebook/tablet bagi mereka yang tinggal di daerah perdesaan.

Jika dilihat berdasarkan lokasi/media dalam mengakses internet (Tabel 3.3), sebagian besar siswa mengakses internet di rumah sendiri (30,73 persen). Sebagian besar pengguna internet yang mengakses di rumah sendiri adalah siswa SD/MI (37,08 persen). Dengan adanya

kemajuan internet, informasi yang dulunya sulit digapai kini begitu mudah diakses hanya dengan beberapa klik pada komputer.

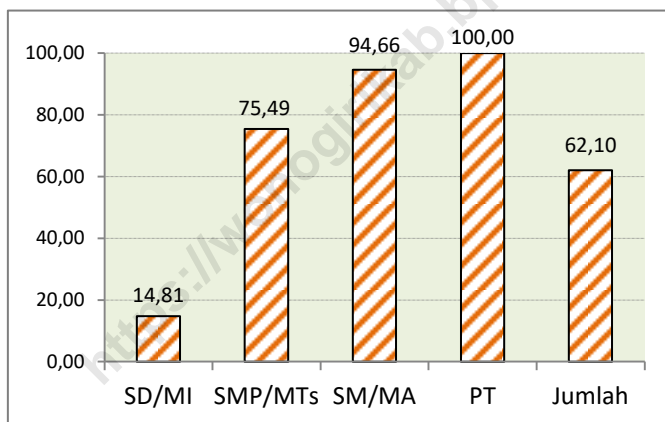
**Tabel 3.3 Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Lokasi Mengakses Internet dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Lokasi/ Media Akses Internet	Jenjang Pendidikan				Total
	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkotaan</b>					
Rumah Sendiri	38,68	33,63	30,39	33,02	33,11
Bukan Rumah Sendiri	26,90	14,84	14,55	8,44	15,29
Tempat Bekerja/ kantor	0,00	0,00	0,00	14,39	2,02
Sekolah/Kampus	5,11	22,58	26,92	9,97	20,12
Tempat Umum (Gratis)	5,76	11,75	6,58	4,94	8,43
Tempat Umum (Berbayar)	5,11	14,50	4,00	4,94	8,69
Dalam Kendaraan yang Bergerak	13,32	2,69	6,68	24,29	8,26
Lainnya	5,11	0,00	10,89	0,00	4,09
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pedesaan</b>					
Rumah Sendiri	36,10	31,91	28,11	27,38	29,82
Bukan Rumah Sendiri	21,53	16,02	15,31	16,20	16,10
Tempat Bekerja/ kantor	0,00	0,62	0,39	4,87	0,93
Sekolah/Kampus	9,97	22,65	25,24	16,55	22,33
Tempat Umum (Gratis)	3,60	4,73	9,52	12,49	7,90
Tempat Umum (Berbayar)	11,96	18,18	11,47	8,32	13,27
Dalam Kendaraan yang Bergerak	16,84	5,23	7,51	14,18	8,22
Lainnya	0,00	0,67	2,44	0,00	1,43
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Perkotaan+Pedesaan</b>					
Rumah Sendiri	37,08	32,49	28,56	29,22	30,73
Bukan Rumah Sendiri	23,58	15,62	15,16	13,66	15,87
Tempat Bekerja/ kantor	0,00	0,41	0,31	7,99	1,23
Sekolah/Kampus	8,12	22,63	25,57	14,40	21,72
Tempat Umum (Gratis)	4,42	7,11	8,94	10,02	8,05
Tempat Umum (Berbayar)	9,35	16,93	10,00	7,22	12,00
Dalam Kendaraan yang Bergerak	15,50	4,37	7,35	17,49	8,23
Lainnya	1,95	0,44	4,10	0,00	2,17
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Peran media sosial pada era komunikasi sekarang ini sudah sangat menjamur di kalangan masyarakat. Media sosial bisa diakses

melalui media apapun. Hal ini yang kemudian memunculkan fenomena akses internet bisa dimanapun termasuk ketika berada dalam kendaraan yang bergerak (8,23 persen). Semakin banyaknya media sosial dan tersedianya sarana prasarana untuk mengakses internet saat ini memudahkan seseorang untuk selalu online dimanapun berada.

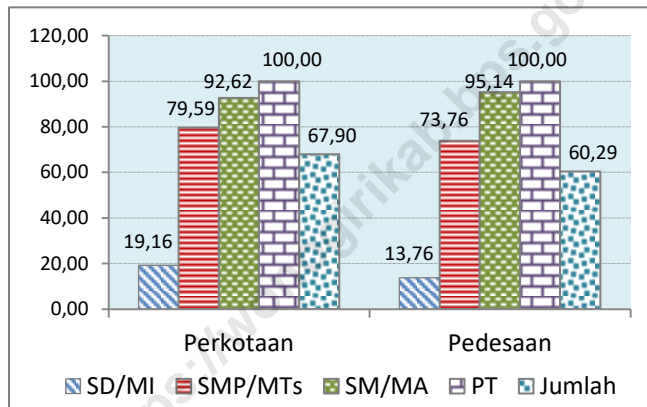
**Gambar 3.1** Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017



Pada Gambar 3.1 menampilkan informasi mengenai persentase siswa berusia 10 tahun ke atas yang selama 3 bulan terakhir mengakses internet berdasarkan hasil Susenas 2017 adalah sebesar 62,10 persen. Jika dilihat menurut jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin meningkat persentase siswa yang mengakses internet. Siswa SD/MI yang mengakses internet sebesar 14,81 persen, SMP/MTs sebesar 75,49 persen, SM/MA sebesar 94,66 persen dan PT sebesar 100 persen. Mahasiswa di PT dituntut untuk selalu mengembangkan potensi dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga

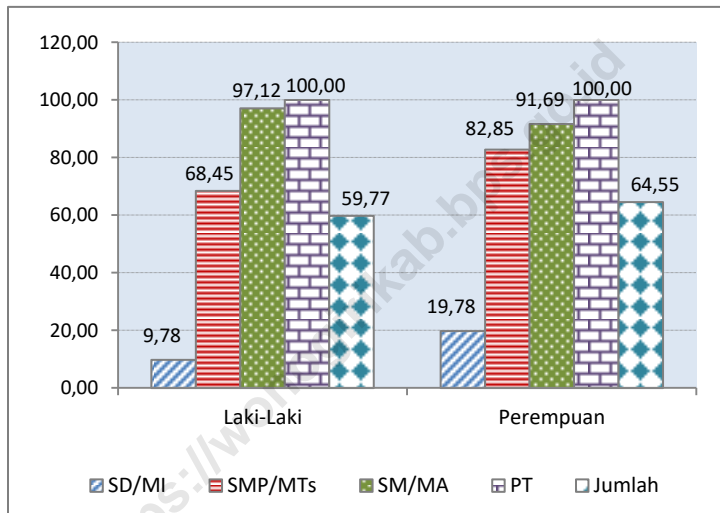
untuk mahasiswa internet sudah menjadi suatu kebutuhan dan ditunjang juga fasilitas internet yang diberikan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

**Gambar 3.2** Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017



Jika dilihat menurut tipe daerah (Gambar 3.2), persentase siswa yang mengakses internet di perkotaan (67,9 persen) hampir 1,12 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di pedesaan (60,29 persen). Kondisi yang sama terjadi pada hampir semua jenjang pendidikan kecuali jenjang SM/MA. Persentase siswa SM/MA yang mengakses internet di perkotaan sedikit lebih rendah daripada mahasiswa di pedesaan, namun masih pada kisaran diatas 70 persen. Sementara pada jenjang SD/MI persentase siswa yang mengakses internet di daerah perkotaan (19,16) mencapai lebih dari 1,3 kali lipat dibandingkan di pedesaan (13,76 persen). Hal ini disebabkan aksesibilitas jaringan internet biasanya lebih tersedia di daerah perkotaan.

**Gambar 3.3** Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis kelamin dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017



Pada gambar 3.2, secara umum menunjukkan kecenderungan siswa perempuan ( 64,55 persen) lebih banyak mengakses internet dibandingkan laki-laki ( 59,77 persen). Kondisi yang sama terjadi pada jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs dan PT dimana perempuan yang mengakses internet lebih tinggi dibanding laki-laki.

### 3.2 Biaya Pendidikan

Berdasarkan UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi



hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (Indirect Cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (oportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan yang dicakup dalam Susenas merupakan keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih bersekolah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:

- (i) biaya pendaftaran, yaitu uang pangkal/gedung/daftar ulang;
- (ii) biaya operasional, terdiri atas uang SPP, komite sekolah, praktikum/keterampilan, iuran OSIS, evaluasi/ujian, bahan penunjang mata pelajaran, seragam sekolah dan olah raga, buku pelajaran/panduan/diktat, lembar kerja siswa, alat tulis dan perlengkapannya, kursus yang diselenggarakan sekolah, dan atau biaya rutin operasional pendidikan lainnya;
- (iv) biaya transportasi dan uang saku.

Jika dirinci menurut jenis pengeluaran pendidikan, terlihat bahwa pengeluaran pendidikan terbesar berasal dari jenis pengeluaran uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG. Biaya pendidikan per kapita untuk jenis pengeluaran ini di daerah perkotaan sebesar Rp. 5.366,- dan di daerah pedesaan Rp 6.337,-. Sementara total pengeluaran untuk uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG sebesar Rp. 6.115,- per kapita per bulan. Jenis pengeluaran lain yang cukup besar adalah untuk sumbangan pembangunan sekolah, dimana untuk daerah perkotaan sebesar Rp. 1.536,- , untuk daerah pedesaan sebesar Rp. 1.158,- dan untuk daerah perkotaan dan pedesaan sebesar Rp. 1.244,- per kapita per bulan.

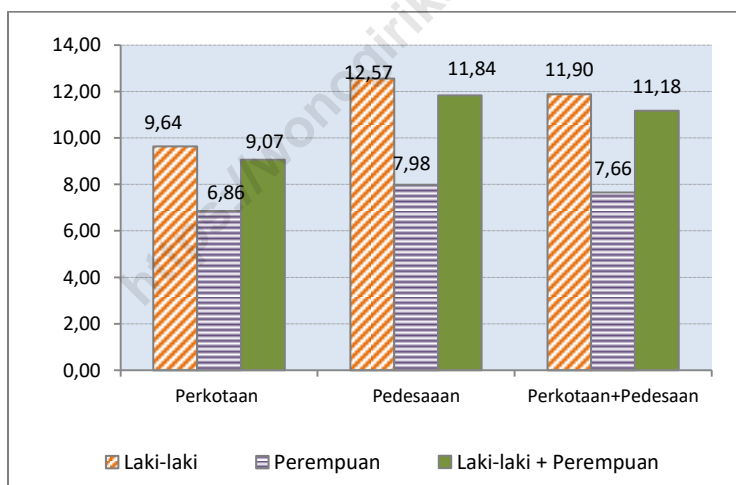
**Tabel 3.4 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017 (Rupiah)**

Jenis Pengeluaran Per Kapita Tiap Bulan	Tipe daerah		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumbangan Pembangunan Sekolah	1.536	1.158	1.244
Uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG	5.366	6.337	6.115
Iuran Sekolah Lainnya	569	583	580
Buku pelajaran,Fotocopy bahan pelajaran	672	815	782
Alat-alat tulis	485	421	436
Uang Kursus	266	175	195

### 3.3 Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dikeluarkan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Bantuan pendidikan dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.

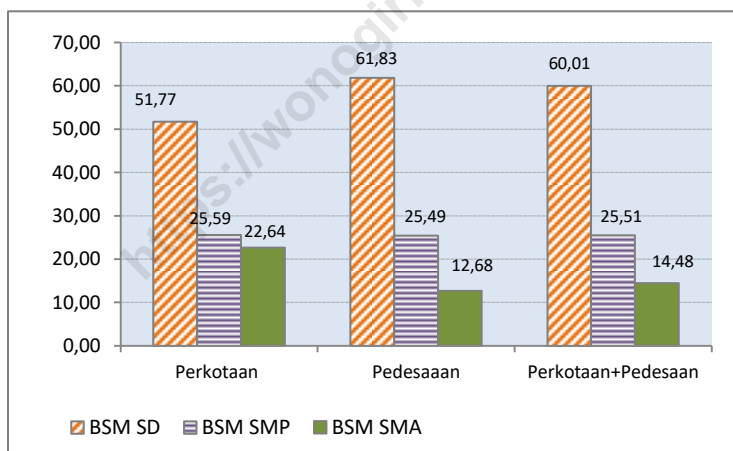
**Gambar 3.4** Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pendidikan menurut Jenis Kelamin KRT dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017



Pada gambar 3.4 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang menerima bantuan pendidikan dengan KRT laki-laki (11,90 persen) lebih tinggi dibanding dengan perempuan (7,66 persen). Dilihat menurut tipe daerah, persentase rumah tangga penerima bantuan pendidikan di daerah pedesaan (11,84 persen) lebih tinggi dibanding daerah perkotaan (9,07 persen).

Data Susenas 2017 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga penerima beasiswa menurut sumber bantuan pendidikan ditunjukkan pada gambar 3.5. Sebagian besar sumber bantuan pendidikan yang diterima oleh peserta didik dalam rumah tangga adalah bantuan/beasiswa yang berasal dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tingkat SD/ sederajat (60,01 persen), kemudian BSM SMP/ sederajat (25,51 persen), dan BSM SMA/ sederajat (14,48 persen).

**Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Sumber Bantuan Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017**



Menurut tipe daerah, persentase Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SD/ sederajat di pedesaan (61,83 persen) lebih besar dibandingkan di perkotaan (51,77 persen). Sedangkan BSM tingkat SMP/ sederajat lebih besar diberikan pada daerah perkotaan sebesar meskipun tidak terlalu besar selisihnya 0,1 persen. Hal sama juga terjadi

pada pemberian BSM di tingkat SMA / sederajat daerah perkotaan sebesar 22,64 persen mencapai lebih dari 1,78 kali lipat dibandingkan pedesaan yang hanya 12,68 persen.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

## BAB 4

## PARTISIPASI PENDIDIKAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP)

serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

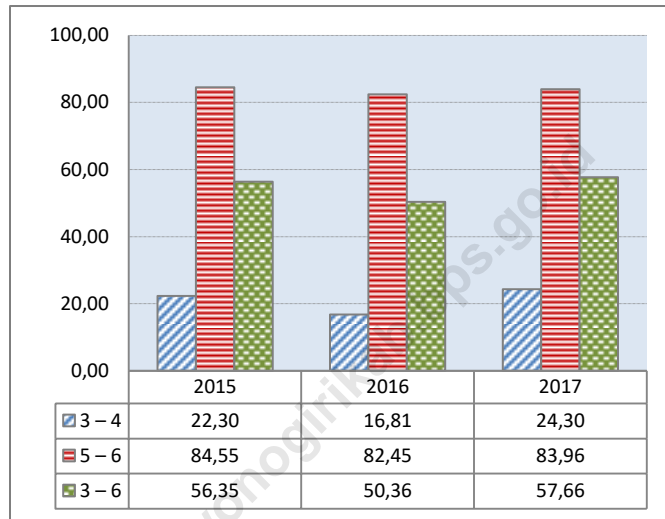
Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2015 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

#### 4.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut pasal 1 ayat 14 UU No 20 Tahun 2003 adalah suatu upaya pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan Utama PAUD yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Sementara tujuan penyertanya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Penyelenggaraan PAUD berdasarkan Permendiknas no 58 tahun 2009 merupakan salah satu bentuk usaha pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu : perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

**Gambar 4.1 Perkembangan Partisipasi Anak yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2015-2017**



Berdasarkan hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan pra sekolah tercatat sebanyak 57,66 persen anak usia 3-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah meningkat dibandingkan dari tahun 2016 sebesar 50,36 persen. Pada kelompok usia 5-6 tahun, partisipasi dalam mengikuti PAUD juga mengalami peningkatan dari 82,45 persen pada tahun 2016 menjadi 83,96 persen pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, partisipasi anak yang mengikuti PAUD yang diperlihatkan tabel 4.1 yaitu usia 3-4 tahun sebesar 24,30 persen, usia 5-6 tahun sebesar 83,96 persen, dan usia 3-6 tahun sebesar 57,66 persen. Dilihat menurut tipe daerah, tercatat bahwa partisipasi anak dalam mengikuti PAUD di daerah pedesaan lebih besar dari pada daerah



perkotaan. Hal ini dapat menunjukkan makin sadarnya masyarakat pedesaan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik mulai anak usia dini. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini juga berpengaruh terhadap keputusan untuk mengikutsertakan anak dalam pendidikan pra sekolah. Persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD di daerah perkotaan tercatat sebesar 56,05 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun dan 33,37 persen untuk kelompok umur 0-6 tahun, sedangkan di daerah pedesaan 58,14 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun dan 32,97 persen untuk kelompok umur 0-6 tahun.

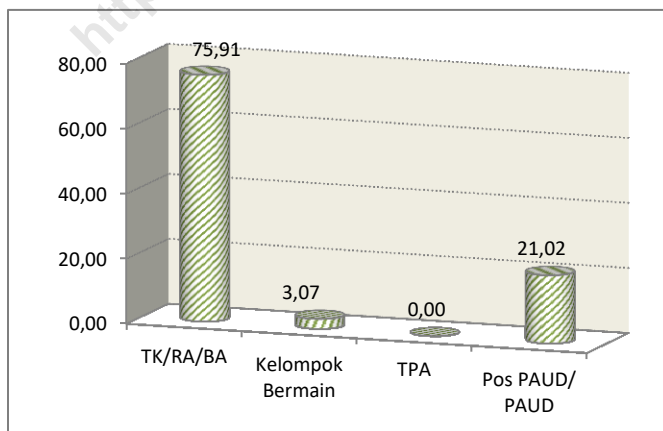
**Tabel 4.1 Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Kelompok Umur				
	0 - 2	3 - 4	5 - 6	0 - 6	3 - 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkotaan</b>	0,00	27,29	83,53	33,37	56,05
<b>Pedesaan</b>	0,00	23,27	84,08	32,97	58,14
<b>Perkotaan+Pedesaan</b>	0,00	24,30	83,96	33,06	57,66
<b>Laki-laki</b>	0,00	21,74	72,69	33,06	47,64
<b>Perempuan</b>	0,00	27,51	93,29	38,22	67,60
<b>Laki-laki+ Perempuan</b>	0,00	24,30	83,96	33,06	57,66

Partisipasi pra sekolah anak perempuan pada kelompok umur 0-6 tahun (38,22) lebih tinggi daripada laki-laki (33,06 persen). Sedangkan untuk kelompok umur 3 – 6 tahun partisipasi pra sekolah anak perempuan (67,60 persen) juga lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (47,64 persen), begitu juga dengan partisipasi pada pada kelompok umur 3-4 tahun dan kelompok umur 5-6 tahun.

Pada Gambar 4.2, memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan pra sekolah yang diikuti anak usia 0-6 tahun adalah TK/BA/RA yaitu sebesar 75,91 persen, kemudian yang mengikuti PAUD/PAUD (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD sejenis lainnya sebesar 31,02 persen, Kelompok bermain sebesar 3,07 persen, Taman Penitipan Anak sangat rendah. Pemerintah menggulirkan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya tentang bagaimana melakukan pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal, serta pemantauannya.

**Gambar 4.2** Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017



## 4.2 Partisipasi Sekolah

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Oleh karena itu pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu upaya lainnya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kemenag, Insatansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 10,38 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 18,13 persen dan penduduk yang

sudah tidak bersekolah lagi sebesar 71,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan.

**Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>Perkotaan</u></b>				
Laki-laki	4,79	18,18	77,03	100,00
Perempuan	12,88	18,43	68,69	100,00
Laki-laki+ Perempuan	8,94	18,31	72,75	100,00
<b><u>Pedesaan</u></b>				
Laki-laki	6,58	19,62	73,8	100,00
Perempuan	14,78	16,63	68,59	100,00
Laki-laki+ Perempuan	10,81	18,07	71,12	100,00
<b><u>Perkotaan+Pedesaan</u></b>				
Laki-laki	6,17	19,29	74,54	100,00
Perempuan	14,35	17,04	68,61	100,00
Laki-laki+ Perempuan	10,38	18,13	71,49	100,00

Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di pedesaan (10,81 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (8,94 persen). Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk pedesaan, dan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan daerah pedesaan. Sementara persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (18,31 persen)

juga lebih besar dibandingkan daerah perdesaan (18,07 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perkotaan (72,75 persen) lebih tinggi daripada perdesaan (71,12 persen).

Faktor demografis lain yang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa terdapat penduduk usia 5-6 tahun yang masih bersekolah yaitu sebesar 20,32 persen, meskipun pada usia ini bukan merupakan usia wajib sekolah. Persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,04 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 98,24 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 81,61 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 11,43 persen.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 5 - 24 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5-6	79,68	20,32	0,00	100,00
7-12	0,96	99,04	0,00	100,00
13-15	0,00	98,24	1,76	100,00
16-18	0,00	81,61	18,39	100,00
19-24	0,93	11,43	87,64	100,00

### 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

$$APS SD = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

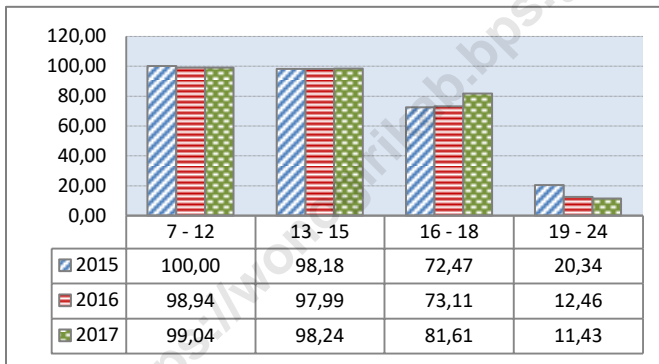
Ket: APS SMP, murid dan penduduk usia 13-15 thn  
APS SMA, murid dan penduduk usia 16-18 thn  
APS PT, murid dan penduduk usia 19-24 thn

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau yang lebih. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Gambar 4.3 memperlihatkan perkembangan APS menurut kelompok umur pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Secara umum, partisipasi sekolah mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun pada setiap kelompok umur. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2015 sebesar 100,00 persen, menurun menjadi 99,04 persen pada tahun dan tahun 2017. Fluktuasi APS juga terjadi pada kelompok umur 13-15 tahun, dari

98,18 persen pada tahun 2015, turun menjadi 97,99 persen pada tahun 2016 dan naik menjadi 98,24 persen pada tahun 2017. APS kelompok umur 7-12 tahun sudah cukup baik dibandingkan kelompok umur lainnya, karena nilainya sudah mendekati 100.

**Gambar 4.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, 2016 dan 2017**



Pada tabel 4.4 terlihat secara umum pada tahun 2017 bahwa APS pendidikan dasar (usia 7-12 dan 13-15 tahun) sudah mendekati atau sama dengan 100,00 persen, hal ini berarti hampir semua anak usia 7-15 tahun bersekolah baik di SD maupun SMP. APS pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki, sedangkan pada kelompok umur pendidikan menengah (usia 16-18 tahun) dan pendidikan tinggi (19-24 tahun) APS perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Wonogiri tidak mengalami masalah kesenjangan gender pada bidang pendidikan.

**Tabel 4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Partisipasi Sekolah			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Laki-laki</b>	98,85	98,00	81,96	12,32
<b>Perempuan</b>	99,24	98,49	81,21	10,55
<b>Laki-laki+ Perempuan</b>	99,04	98,24	81,61	11,43
<b>Perkotaan</b>	97,31	100,00	89,43	8,26
<b>Pedesaan</b>	99,54	97,63	79,37	12,37
<b>Perkotaan+Pedesaan</b>	99,04	98,24	81,61	11,43

APS di perkotaan untuk jenjang SMP dan SM cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Namun untuk APS SD dan PT terlihat kondisi sebaliknya.

#### 4.4 Angka Partisipasi Kasar

$$APK_{SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$$

Ket: APK dan murid SMP, penduduk usia 13-15 thn  
 APK dan murid SMA, penduduk usia 16-18 thn,  
 APK dan murid PT, penduduk usia 19-24 thn.

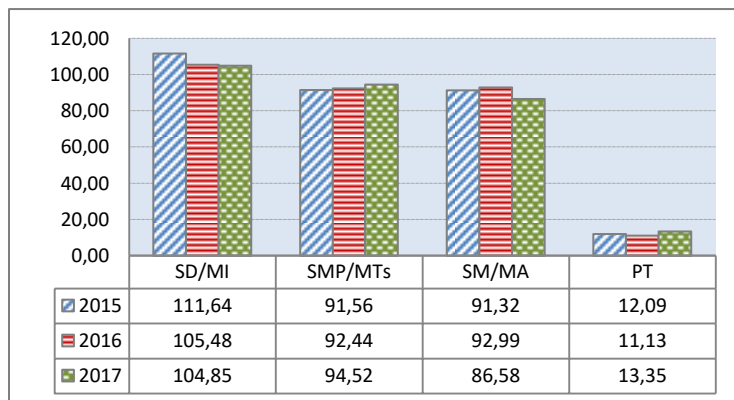


Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya.

APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

**Gambar 4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, 2016 dan 2017**



Perkembangan APK berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Gambar 4.4 menyajikan APK pada jenjang sekolah dasar dan pendidikan tinggi dari tahun 2015, 2016, hingga 2017. Pada tahun 2015 - 2017, APK SD/MI angkanya cenderung turun setiap tahun. APK SD/MI pada tahun 2015 tercatat sebesar 111,64 persen, menurun menjadi 105,48 persen pada tahun 2016 dan turun lagi menjadi 104,85 persen pada tahun 2017. Sedangkan APK SMP/MTs meningkat dari 91,56 persen tahun 2015 menjadi 92,44 persen pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 94,52 persen pada tahun 2017. Bahkan untuk APK pada jenjang PT juga cenderung mengalami meningkat. Sementara pada APK SM/MA pada tahun 2015 tercatat sebesar 91,32 persen, meningkat menjadi 92,99 persen pada tahun 2016 dan turun menjadi 86,58 persen pada tahun 2017.

**Tabel 4.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Partisipasi Sekolah			
	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Laki-laki</b>	100,91	94,40	88,47	12,44
<b>Perempuan</b>	109,29	94,64	84,41	14,25
<b>Laki-laki+ Perempuan</b>	104,85	94,52	86,58	13,35
<b>Perkotaan</b>	95,08	109,40	74,34	20,75
<b>Pedesaan</b>	107,70	89,41	90,10	11,16
<b>Perkotaan+Pedesaan</b>	104,85	94,52	86,58	13,35

Jika dilihat menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan pada tahun 2017 (Tabel 4.5) menunjukkan bahwa APK untuk SD secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, daerah perkotaan maupun perdesaan, sebagian besar nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD atau sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid SD yang tinggal kelas.

APK menurut jenis kelamin relatif tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah kesenjangan gender pada bidang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan PT, APK laki-laki lebih rendah daripada APK perempuan. Sementara pada jenjang APK SM/MA, APK laki-laki (88,47 persen) lebih besar daripada perempuan (84,41 persen).

APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) dan pendidikan tinggi (PT). Di daerah perkotaan, APK SMP/MTs sebesar 109,40 persen dan APK PT sebesar 20,75 persen. Untuk daerah perdesaan, APK SMP/MTs sebesar 89,41 persen dan APK PT sebesar 11,16 persen. Sementara itu pada jenjang SD/MI dan SM/MA, APK daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan.

## 4.5 Angka Partisipasi Murni

$$APM_{SD} = \frac{\text{Jumlah murid jenjang SD usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$$

Ket: APK dan murid jenjang SMP usia 13-15 thn, penduduk usia 13-15 thn  
APK dan murid jenjang SMA usia 16-18 thn, penduduk usia 16-18 thn  
APK dan murid jenjang PT usia 19-24 thn, penduduk usia 19-24 thn

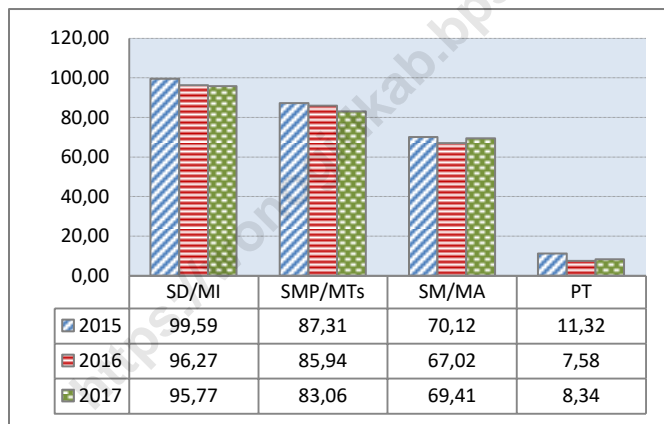
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/MI yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Pada jenjang pendidikan dasar selama periode tahun 2015, 2016 hingga 2017, Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami fluktuasi di jenjang tingkat SM/MA dan tingkat PT. APM jenjang pendidikan SM/MA pada tahun 2015 sebesar 70,12 persen, turun menjadi 67,02 persen pada tahun 2016 dan meningkat 69,41 persen pada tahun 2017. APM jenjang PT tahun

2015 sebesar 11,32 persen, turun menjadi sebesar 7,58 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 8,34 persen tahun 2017. Angka APM masih di kisaran nilai lebih dari 90 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI. Sedangkan APM SMP/Mts berada pada kisaran 80 persen (Tabel 4.5).

**Gambar 4.5 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, 2016 dan 2017**



Tabel 4.6 menyajikan bahwa pada tahun 2017 secara umum nilai APM untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100 persen. APM pendidikan cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. APM pada jenjang SD/MI sebesar 95,77 persen, sedangkan pada jenjang di atasnya jauh lebih rendah. Secara berturut-turut APM SMP/MTs sebesar 83,06 persen, APM SM/MA sebesar 69,41 persen, dan APM PT sebesar 8,34 persen.

Dilihat berdasarkan tipe daerah, secara umum APM di daerah perkotaan lebih rendah daripada daerah perdesaan. Di daerah

perkotaan, APM SD/MI sebesar 91,89 persen, APM SMP/MTs sebesar 85,79 persen, APM SM/MA sebesar 56,98 persen dan APM PT sebesar 8,26 persen. Untuk daerah pedesaan, APM SD/MI sebesar 96,90 persen, APM SMP/MTs sebesar 82,12 persen, APM SM/MA sebesar 72,98 persen dan APM PT sebesar 8,36 persen.

**Tabel 4.6 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Partisipasi Sekolah			
	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Laki-laki</b>	96,12	87,18	73,54	7,84
<b>Perempuan</b>	95,38	78,73	64,66	8,82
<b>Laki-laki+ Perempuan</b>	95,77	83,06	69,41	8,34
<b>Perkotaan</b>	91,89	85,79	56,98	8,26
<b>Pedesaan</b>	96,90	82,12	72,98	8,36
<b>Perkotaan+Pedesaan</b>	95,77	83,06	69,41	8,34

Berdasarkan jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang signifikan antara APM laki-laki dengan APM perempuan. APM laki-laki lebih besar daripada APM perempuan di hampir semua jenjang pendidikan, kecuali pada jenjang PT. APM jenjang PT pada laki-laki sedikit lebih rendah daripada APM perempuan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender bukan menjadi masalah dalam pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bersaing dapat terbentuk melalui pendidikan bermutu dalam pembangunan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pembukaan UUD 1945 alinea keempat). Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sektor pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak Negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

## 5.1 Angka Melek Huruf

$$AMH = \frac{\text{Jml penduduk umur 15 thn keatas bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk umur 15 thn keatas}} \times 100$$

Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka melek aksara merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi. Di dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Angka melek huruf merupakan salah satu variable dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).



Pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat. Dalam pengembangan masyarakat, program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh sasaran perubahan. Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional (KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995.

**Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2017**

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Kelompok Umur			
	15 - 24	25 - 44	45+	15+
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)
<b><u>Perkotaan</u></b>				
Laki-laki	100,00	100,00	93,45	96,51
Perempuan	95,67	100,00	77,69	87,25
Laki-laki+ Perempuan	97,86	100,00	85,21	95,11
<b><u>Pedesaan</u></b>				
Laki-laki	100,00	99,26	90,46	94,69
Perempuan	100,00	98,96	70,84	83,77
Laki-laki+ Perempuan	100,00	99,10	80,09	88,99
<b><u>Perkotaan+Pedesaan</u></b>				
Laki-laki	100,00	99,43	91,15	95,11
Perempuan	99,01	99,20	72,39	84,56
Laki-laki+ Perempuan	99,51	99,31	81,26	89,61

Berdasarkan hasil Susenas 2017, kondisi keaksaraan Kabupaten Wonogiri yang disajikan pada tabel 5.1 terlihat bahwa persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 89,61 persen. Rendahnya angka melek huruf pada kelompok umur 15 tahun ke atas ini dipengaruhi oleh kelompok umur 45 tahun ke atas. Persentase penduduk 45 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 81,26 persen.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 15 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 88,99 persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar 95,11 persen. Kondisi yang hampir sama terjadi pada kelompok umur lainnya dimana persentase penduduk yang melek huruf di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan, kecuali kelompok umur 25-44 tahun yang terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan di daerah perkotaan lebih banyak tersedia fasilitas pendidikan dibandingkan daerah perdesaan.

Persentase penduduk perempuan melek huruf umur 15 tahun ke atas sebesar 84,56 persen, lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 95,11 persen. Kondisi tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dan hampir di semua kelompok umur.

Salah satu target MDGs adalah menjamin pada 2017 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian tersebut adalah angka melek huruf penduduk 15-24 tahun. Jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, angka melek huruf kelompok umur 15-24 tahun cenderung lebih tinggi.

## 5.2 Rata-rata Lama Sekolah

*Rata-rata lama sekolah = Tahun Konversi + (Kelas Tertinggi yang pernah diduduki - 1)*

*Tahun Konversi Pendidikan yang ditamatkan:*

*SD = 6 Tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 Tahun; D1/D2 = 14 tahun;*

*D3 = 15 Tahun; D4/S1 = 16 Tahun; S2/S3 = 18 tahun*

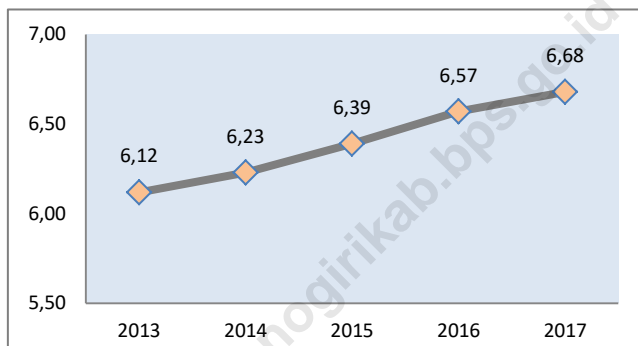
Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pembentuk indikator IPM dengan metode baru ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 25 tahun.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP

adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

**Gambar 5.1 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, Kabupaten Wonogiri 2013 - 2017**

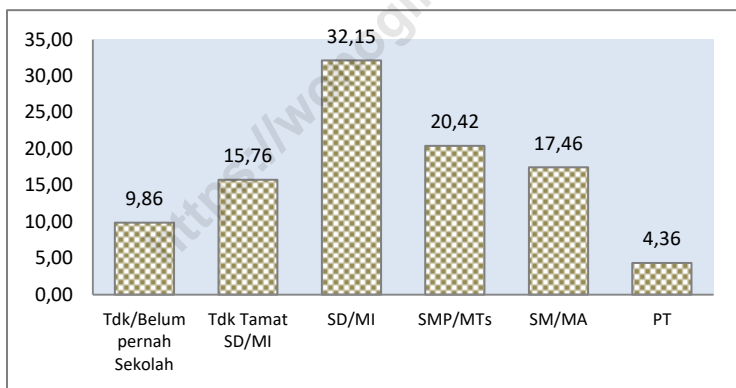


Gambar 5.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2017 mencapai 6,68 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 6 SD (kelas VI) atau putus sekolah di kelas 1 SMP (kelas VII). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 6,12 tahun menjadi sebesar 6,23 tahun pada tahun 2014 menjadi 6,39 tahun pada tahun 2015 menjadi 6,57 tahun pada tahun 2016 dan menjadi 6,68 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan. Jika rata-rata lama sekolah dapat terus ditingkatkan, diharapkan sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai.

### 5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

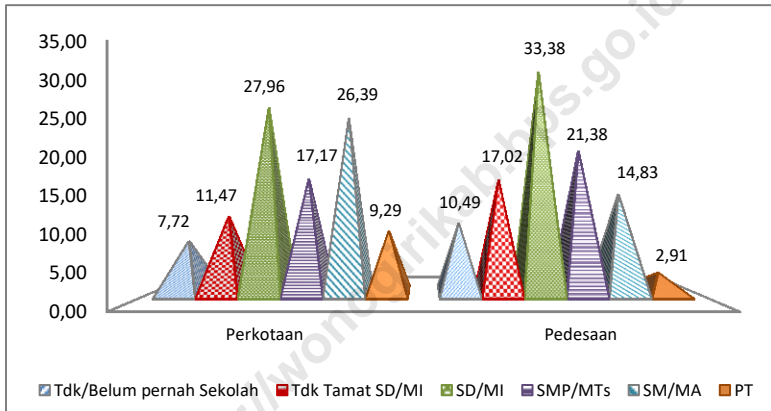
**Gambar 5.2** Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2017



Kualitas SDM Kabupaten Wonogiri dapat digambarkan dari pendidikan yang ditamatkan, tersajikan pada Gambar 5.2 yang menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SD/MI sebesar 32,15 persen, diikuti tamat SMP/MTs sebesar 20,42 persen, dan tamat SM/MA sebesar 17,46 persen. Sedangkan persentase penduduk yang tamat PT sebesar 4,36 persen. Disamping itu masih terdapat sebesar 9,86 persen penduduk 15 tahun ke atas yang belum

pernah mengenyam pendidikan dan sebesar 15,76 persen pernah bersekolah diSD/MI namun tidak tamat.

**Gambar 5.3** Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2017

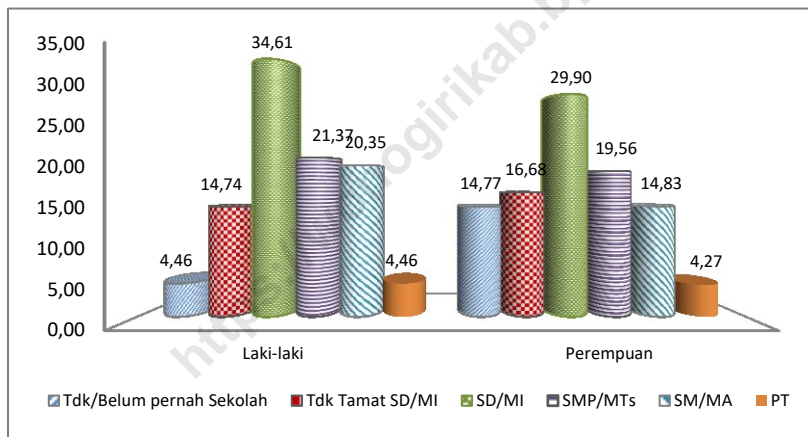


Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk pedesaan. Persentase penduduk di perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SM/MA ke atas (SM/MA, dan PT) sebesar 35,68 persen, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan pedesaan sebesar 31,74 persen. Sedangkan persentase penduduk yang belum mengenyam pendidikan di pedesaan (10,49 persen) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (7,72persen).

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang belum pernah mengenyam pendidikan sebesar 14,77 persen, lebih dari tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 4,46 persen.

Selain itu persentase perempuan yang menamatkan pendidikan SMP/MTs ke atas (SMP/MTs, SM/MA, dan PT) sebesar 38,66 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 46,18 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

**Gambar 5.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2017**



# LAMPIRAN

<https://www.wonorejo.kab.bps.go.id>



<https://wonogirikab.bps.go.id>

**Tabel 1 Jumlah Rumah Tangga menurut Tipe Daerah (ribuan) Kabupaten Wonogiri, 2014-2017**

Tahun	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Pedesaan	
	(1)	(2)	
<b>2014</b>	54,92	214,70	269,63
<b>2015</b>	56,22	224,43	280,65
<b>2016</b>	61,41	210,36	271,77
<b>2017</b>	63,97	203,14	267,11

Sumber: Susenas 2014-2017

**Tabel 2** Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan</b>	106,81	111,52	218,33
<b>Pedesaan</b>	356,78	378,91	735,70
<b>Perkotaan + Pedesaan</b>	463,59	490,44	954,03

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 3 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Kelompok Umur	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>0-2</b>	7,88	29,24	37,12
<b>3-4</b>	5,66	16,33	22,00
<b>5-6</b>	5,93	21,96	27,89
<b>7-12</b>	17,73	60,78	78,51
<b>13-15</b>	10,47	30,49	40,96
<b>16-18</b>	8,57	29,85	38,42
<b>19-24</b>	13,55	45,86	59,40
<b>25-44</b>	54,64	184,26	238,91
<b>45+</b>	93,89	316,92	410,81
<b>Total</b>	218,33	735,70	954,03

*Sumber: Susenas 2017*

**Tabel 4**      **Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Kelompok Umur	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>0-2</b>	3,61	3,97	3,89
<b>3-4</b>	2,59	2,22	2,31
<b>5-6</b>	2,72	2,99	2,92
<b>7-12</b>	8,12	8,26	8,23
<b>13-15</b>	4,80	4,14	4,29
<b>16-18</b>	3,93	4,06	4,03
<b>19-24</b>	6,20	6,23	6,23
<b>25-44</b>	25,03	25,05	25,04
<b>45+</b>	43,00	43,08	43,06
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Susenas 2017*

**Tabel 5 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Biaya Pendidikan Tiap Bulan menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Tiap Bulan	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sumbangan Pembangunan Sekolah</b>	1.536	1.158	1.244
<b>Uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG</b>	5.366	6.337	6.115
<b>Iuran Sekolah Lainnya</b>	569	583	580
<b>Buku pelajaran, Fotocopy bahan pelajaran</b>	672	815	782
<b>Alat-alat tulis</b>	485	421	436
<b>Uang Kursus</b>	266	175	195
<b>Total</b>	8.894	9.489	9.352

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 6**      **Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

<b>Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Pedesaan</b>	<b>Perkotaan + Pedesaan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Masih/ pernah mengikuti Pra sekolah tahun ajaran 2016/2017</b>	30,47	23,89	25,36
<b>Pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran 2015/2016</b>	1,02	7,27	5,87
<b>Pernah mengikuti pra sekolah sebelum tahun ajaran 2015/2016</b>	1,89	1,82	1,83
<b>Tidak/belum pernah mengikuti Pra Sekolah</b>	66,62	67,02	66,94
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Susenas 2017*

**Tabel 7**      **Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Kelompok Umur (Tahun)	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 2	0,00	0,00	0,00
3 - 4	27,29	23,27	24,30
5 - 6	83,53	84,08	83,96
0 - 6	33,37	32,97	33,06
3 - 6	56,05	58,14	57,66

*Sumber: Susenas 2017*



**Tabel 8**      **Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2017**

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 2	0,00	0,00	0,00
3 - 4	21,74	27,51	24,30
5 - 6	72,69	93,29	83,96
0 - 6	33,06	38,22	33,06
3 - 6	47,64	67,60	57,66

*Sumber: Susenas 2017*

**Tabel 9** Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Taman Kanak-kanak	57,04	74,18	70,30
RA/BA	24,83	0,00	5,61
PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dll	11,67	23,75	21,02
Kelompok Bermain	6,46	2,07	3,07
Taman Penitipan Anak	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 10** Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2014-2017

Tahun	0 – 6 Tahun			3 – 6 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	jumlah	Laki-laki	Perempuan	jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2014</b>	19,06	11,91	15,49	30,95	21,48	26,47
<b>2015</b>	22,35	23,63	22,97	39,14	40,39	39,75
<b>2016</b>	19,10	20,30	19,67	32,85	32,73	32,79
<b>2017</b>	22,32	27,37	24,89	38,37	48,42	43,42

Sumber: Susenas 2014-2017

**Tabel 11.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Perkotaan

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak/Belum Pernah Bersekolah</b>	4,79	12,88	8,94
<b>Masih Bersekolah</b>	18,18	18,43	18,31
<b>Tidak Bersekolah Lagi</b>	77,03	68,69	72,75
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

**Tabel 11.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Pedesaan

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak/Belum Pernah Bersekolah</b>	6,58	14,78	10,81
<b>Masih Bersekolah</b>	19,62	16,63	18,07
<b>Tidak Bersekolah Lagi</b>	73,80	68,59	71,12
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 11.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Perkotaan + Pedesaan

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak/Belum Pernah Bersekolah</b>	6,17	14,35	10,38
<b>Masih Bersekolah</b>	19,29	17,04	18,13
<b>Tidak Bersekolah Lagi</b>	74,54	68,61	71,49
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 12**      **Persentase Penduduk Usia 7-12 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Partisipasi Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak/Belum Pernah Bersekolah</b>	2,69	0,46	0,96
<b>Masih Bersekolah</b>	97,31	99,54	99,04
<b>Tidak Bersekolah Lagi</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Susenas 2017*

**Tabel 13**      **Persentase Penduduk Usia 13-15 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Partisipasi Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak/Belum Pernah Bersekolah</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Masih Bersekolah</b>	100,00	97,63	98,24
<b>Tidak Bersekolah Lagi</b>	0,00	2,37	1,76
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Susenas 2017*



**Tabel 14**      **Persentase Penduduk Usia 16-18 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Partisipasi Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak/Belum Pernah Bersekolah</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Masih Bersekolah</b>	89,43	79,37	81,61
<b>Tidak Bersekolah Lagi</b>	10,57	20,63	18,39
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Susenas 2017*

**Tabel 15**      **Persentase Penduduk Usia 19-24 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Partisipasi Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak/Belum Pernah Bersekolah</b>	4,09	0,00	0,93
<b>Masih Bersekolah</b>	8,26	12,37	11,43
<b>Tidak Bersekolah Lagi</b>	87,65	87,63	87,64
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Susenas 2017*

**Tabel 16**      **Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Sedang Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017**

Jenjang Pendidikan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>SD/MI</b>	44,96	52,48	50,74
<b>SMP/MTs</b>	30,55	21,86	23,86
<b>SM/MA</b>	16,99	21,56	20,50
<b>PT</b>	7,50	4,10	4,90
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Susenas 2017*

**Tabel 17.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
7-12	95,18	100,00	97,31
13-15	100,00	100,00	100,00
16-18	91,61	87,80	89,43
19-24			8,26

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 17.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

**Pedesaan**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>7-12</b>	100,00	99,04	99,54
<b>13-15</b>	97,33	97,96	97,63
<b>16-18</b>	79,86	78,72	79,37
<b>19-24</b>			12,37

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 17.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
<b>7-12</b>	98,85	99,24	99,04
<b>13-15</b>	98,00	98,49	98,24
<b>16-18</b>	81,96	81,21	81,61
<b>19-24</b>	12,32	10,55	11,43

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 18.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

**Perkotaan**

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	90,84	100,44	95,08
SMP/MTs/ Paket B	101,51	117,36	109,40
SMA/SMK/ MA/Paket C	92,83	60,48	74,34
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3			20,75

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 18.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

**Pedesaan**

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	104,05	111,68	107,70
SMP/MTs/ Paket B	92,02	86,62	89,41
SMA/SMK/ MA/Paket C	87,52	93,46	90,10
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3			11,16

Sumber: Susenas 2017



**Tabel 18.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

**Perkotaan+Pedesaan**

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	100,91	109,29	104,85
SMP/MTs/ Paket B	94,40	94,64	94,52
SMA/SMK/ MA/Paket C	88,47	84,41	86,58
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3	12,44	14,25	13,35

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 19.1 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

**Perkotaan**

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	89,60	94,79	91,89
SMP/MTs/ Paket B	91,01	80,53	85,79
SMA/SMK/ MA/Paket C	79,95	39,78	56,98
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3			8,26

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 19.2 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

Pedesaan

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	98,15	95,54	96,90
SMP/MTs/ Paket B	85,90	78,09	82,12
SMA/SMK/ MA/Paket C	72,14	74,07	72,98
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3			8,36

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 19.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

<u>Perkotaan+Pedesaan</u>			
Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	96,12	95,38	95,77
SMP/MTs/ Paket B	87,18	78,73	83,06
SMA/SMK/ MA/Paket C	73,54	64,66	69,41
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3	8,36	7,84	8,34

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 20.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

**Perkotaan**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>15 Tahun ke Atas</b>	96,51	87,25	95,11
<b>15 – 24 Tahun</b>	100,00	95,67	97,86
<b>25 – 44 Tahun</b>	100,00	100,00	100,00
<b>45 Tahun ke Atas</b>	93,45	77,69	85,21

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 20.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

**Pedesaan**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>15 Tahun ke Atas</b>	94,69	83,77	88,99
<b>15 – 24 Tahun</b>	100,00	100,00	100,00
<b>25 – 44 Tahun</b>	99,26	98,96	99,10
<b>45 Tahun ke Atas</b>	90,46	70,84	80,09

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 20.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

Perkotaan+Pedesaan

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>15 Tahun ke Atas</b>	95,11	84,56	89,61
<b>15 – 24 Tahun</b>	100,00	99,01	99,51
<b>25 – 44 Tahun</b>	99,43	99,20	99,31
<b>45 Tahun ke Atas</b>	91,15	72,39	81,26

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 21** Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	7,72	10,49	9,86
Tidak Tamat SD	11,47	17,02	15,76
SD/MI	27,96	33,38	32,15
SMP/MTs	17,17	21,38	20,42
SM/MA	26,39	14,83	17,46
PT	9,29	2,91	4,36
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas 2017



**Tabel 22**      **Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	4,46	14,77	9,86
Tidak Tamat SD	14,74	16,68	15,76
SD/MI	34,61	29,90	32,15
SMP/MTs	21,37	19,56	20,42
SM/MA	20,35	14,83	17,46
PT	4,46	4,27	4,36
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 23**      **Persentase Siswa Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2015-2017**

Tipe Daerah	Tahun		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan</b>	65,51	52,11	67,90
<b>Perdesaan</b>	44,65	44,33	60,29
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	49,13	46,07	62,10

*Sumber: Susenas 2015-2017*

**Tabel 24 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2015-2017**

Tipe Daerah	Tahun		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki		7,18	6,39
Perempuan		6,02	6,57
Laki-Laki + Perempuan	6,39	6,57	6,68

Sumber: Susenas 2015-2017

**Tabel 25** Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2017

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Putus Saat SD Kelas 6	0,00	0,00	0,00
Putus Saat SMP Kelas 3	18,04	13,29	15,90
Putus Saat SM Kelas 3	84,23	73,57	79,87

Sumber: Susenas 2017

**Tabel 26** Angka Drop Out menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2017

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
DO - SD	0,00	0,00	0,00
DO - SMP	6,85	0,73	3,80
DO - SM	0,00	4,91	2,10

Sumber: Susenas 2017

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2016, *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2015*, Semarang,

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2017, *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2016*, Semarang,

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2018, *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2017*, Semarang

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2018, *Indikator Utama Sosial, Politik Dan Keamanan Jawa Tengah 2017*, Semarang,

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri,2017, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri Tahun 2017*, Wonogiri,

<https://www.linkedin.com/pulse/makna-dan-implikasi-uu-sisdiknas-20-thn-2003-terhadap-fsopiah-zenal>

<https://wonogirikab.bps.go.id>

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOGIRI**

Jl. Pelem II No.8 Wonogiri 57612

Email : [bps3312@bps.go.id](mailto:bps3312@bps.go.id)

Telp : 0273-321055